



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



PERSIAPAN APLIKASI JDIHN SEBAGAI APLIKASI UMUM SPBE

Hamzah Fansuri, M.Sc

Analisis Kebijakan Muda, pada Asdep Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Selasa, 18 Oktober 2022

REFORMASI BIROKRASI



REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI TOOLS PERCEPATAN PRIORITAS KERJA PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong rotong

MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

PRIORITAS KERJA

1. PEMBANGUNAN SDM
2. MEMPERCEPAT DAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3. UNDANG INVESTASI SELUAS - LUASNYA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN
4. REFORMASI BIROKRASI
5. APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN

RB

BIROKRASI YANG BERSIH & AKUNTABEL

BIROKRASI YANG KAPABEL

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

SPBE DALAM REFORMASI BIROKRASI

SPBE BAGIAN DARI AREA PERUBAHAN TATA LAKSANA

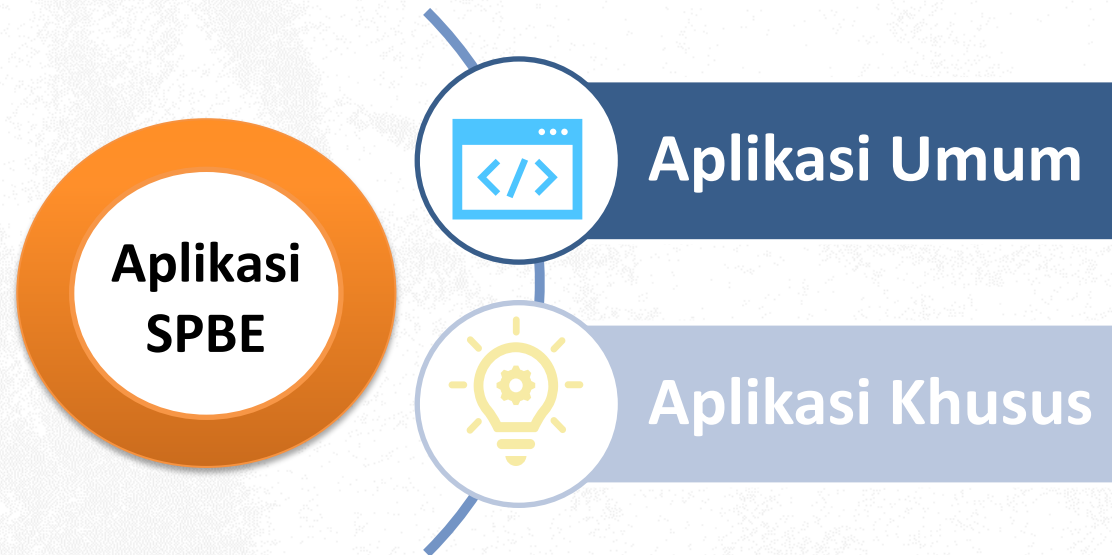


RUANG LINGKUP PENGATURAN SPBE

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KEBIJAKAN APLIKASI SPBE

Satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.



Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Pengguna

“Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.”

KONDISI PENERAPAN SPBE

SILO-BASED SPBE

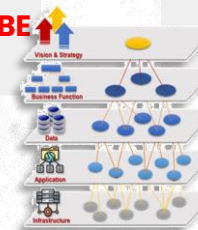
Tantangan Penerapan Digital Government

1. **Pembangunan TIK sektoral**
2. **Tata Kelola TIK dan data tidak terpadu**
3. Tingkat Kematangan SPBE rendah
4. Belum optimal penerapan Keamanan Informasi



Percepatan Penerapan SPBE

1. Perlunya **peningkatan kualitas layanan pemerintah**, melalui **pemanfaatan teknologi digital**
2. Kebutuhan **penguatan kolaborasi dan koordinasi**
3. memperkuat Keamanan Informasi
4. Keperluan **integrasi layanan pemerintah**, melalui **mekanisme interoperabilitas**,
5. Menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis**
6. Penerapan **standarisasi TIK untuk peningkatan kualitas layanan digital Nasional**
7. **Peningkatan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**



Hasil yang Diharapkan

1. Arsitektur SPBE Nasional sebagai **panduan integrasi dan interoperabilitas antar proses bisnis dan dukungan TIK**, serta penguatan keamanan informasi secara terpadu
2. **Mempercepat terbentuknya Layanan Digital Nasional, bagian upaya modernisasi birokrasi berbasis digital**
3. Mendukung efektivitas tata Kelola pemerintahan, meningkatkan Tingkat Kematangan SPBE



KONDISI PENERAPAN SPBE

SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

Teridentifikasi kurang lebih sebanyak 24 jenis aplikasi yang berpotensi pembangunannya terduplikasi

SIMDUKCAPIL	SIM Pajak dan Retribusi, SIMTAP, SAMSAT	SIM Perijinan, SIM Pendaftaran	SIM Bisnis dan Investasi	SIM Barang dan Aset Daerah
LPSE	SIM Arsip / Manajemen Dokumen	SIM Pemilu	SIM Perpu	SIM Data Pembangunan
Knowledge Management, Data warehouse	SIM Penganggaran Berbasis Kinerja	SIM Perkantoran Elektronik	SIM Monev	SIDA (Sistem Informasi Diklat Aparatur)
SIM Pendapatan Daerah	SIM Kepegawaian	SIM Pengaduan Masyarakat	SIM Perusahaan Daerah	SIM Tata Ruang
GIS-SIM Potensi Daerah	SIM Pertanian, SIM Perkebunan	SIM Perikanan dan Kelautan	SIM Pariwisata	

Sumber Dewan TIK Nasional

KONDISI PENERAPAN SPBE

SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

kumparanBISNIS

Cari di sini...

News Entertainment Bisnis Food & Travel Bola & Sports Woman Mom Ot

Makro Finansial Energi Sektor Riil Market Infrastruktur Ekonomi Digital

Beranda > Bisnis

Sri Mulyani Kesal Kementerian Punya 24.000 Aplikasi, Tapi Tidak Semua Beroperasi

kumparanBISNIS

11 Juli 2022 10:24 · waktu baca 1 menit

8 8



money.kompas.com/read/2022/07/12/140407226/sri-mulyani-keluhkan-24000-aplikasi-pemerintah-bikin-boros-anggaran-menkominfo-akan-ditutup


NEWS TREN HEALTH FOOD EDUKASI PARAPUAN MONEY UMKM TEKNO LIFESTYLE HOMEY PROPERTI BOLA TRAVEL OTOMOTIF SAINS

Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran, Menkominfo: Akan Ditutup

Kompas.com / Money / Whats New

Kompas.com - 12/07/2022, 14:04 WIB

BAGIKAN: f t w a



https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220711111214-37-354570/kominfo-bakal-bikin-1-super-app-24-ribu-lainnya-dimatikan

MARKET INVESTMENT NEWS ENTREPRENEUR SYARIAH TECH LIFESTYLE INSID

Kominfo Bakal Bikin 1 Super App, 24 Ribu Lainnya Dimatikan

TECH - Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia

11 July 2022 11:15

SHARE | f t



Pembangunan Aplikasi pada Instansi Pemerintah tanpa didukung dengan tata kelola yang baik menyebabkan tidak terpadunya SPBE secara nasional

KONDISI PENERAPAN SPBE

SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE



Diperkirakan terdapat **24** Aplikasi Umum

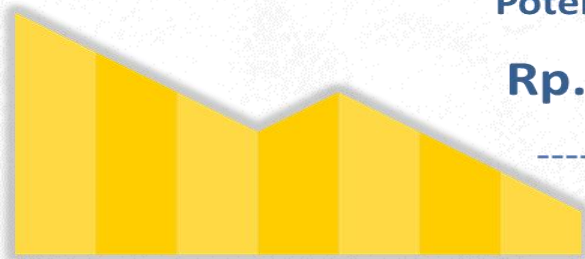
Asumsi Investasi Rp **500** Juta – **1 M** / Aplikasi



Instansi yang menggunakan Aplikasi Umum **623** instansi pemerintah

Potensi Efisiensi = $24 \times (500 \text{ juta s/d } < 1 \text{ M}) \times 623 =$

Rp. **7,47** s/d Rp. **14,95** Triliun



Penerapan aplikasi umum berbagi pakai merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya **pembangunan silo based application**

PERCEPATAN SPBE

MELALUI PEMBANGUNAN APLIKASI UMUM



PASAL 62 s.d. 69 PERPRES 95/2018

APLIKASI UMUM



- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, monev
- Target: Selesai Tahun 2023

Koordinator:
Kementerian PPN/Bappenas

APLIKASI UMUM



- Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

APLIKASI UMUM



- Integrasi layanan kearsipan dinamis
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

APLIKASI UMUM



- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:
Kementerian PANRB

Aplikasi Umum akan ditetapkan oleh Menteri PANRB dan mencakup persyaratan proses bisnis, persyaratan data, persyaratan teknologi, dan persyaratan keamanan.

APLIKASI UMUM SPBE

RENCANA PENETAPAN APLIKASI UMUM



KRISNA
(KEMENPPN/BAPPENAS)



SIPD
(KemenDAGRI)



SJDIH
(Kemenkumham/BPHN)

APLIKASI UMUM SPBE

CONTOH KEBIJAKAN PENERAPAN APLIKASI UMUM



ANRI SRIKANDI

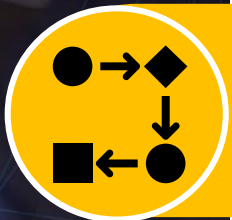
KEPMENPANRB NO.
679 TAHUN 2020



Menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.



Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis berlaku secara nasional.



Pengembangan dan pembinaan penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis pada unsur proses bisnis dan data dilaksanakan oleh ANRI.



Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis di lingkungan instansi masing-masing.



Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis memiliki persyaratan proses bisnis, data, TIK, dan keamanan

PASAL 37 Ayat 3 PERPRES 95 Tahun 2018

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan syarat:



Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan



Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis



Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan persyaratan proses bisnis, data, TIK, dan keamanan aplikasi umum



Mendapat pertimbangan dari Kominfotik

APLIKASI UMUM SPBE

KOLABORASI PENETAPAN APLIKASI UMUM

Penyusunan kebijakan penetapan aplikasi umum dilakukan secara kolaborasi dengan kementerian/Lembaga terkait



PROSES
BISNIS



panrb

KEHENTERIAN
PENGADILAN ANGGARAN NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



DATA



panrb

KEHENTERIAN
PENGADILAN ANGGARAN NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



TIK



KEMKOMINFO

KEAMANAN





Persyaratan proses bisnis dalam format BPMN (Permenpan 19/2018) sampai dengan level 2



Persyaratan proses bisnis mencakup proses bisnis integrasi aplikasi



Perlu dilakukan reviu dokumen persyaratan proses bisnis secara intensif sebelum aplikasi umum SPSE ditetapkan



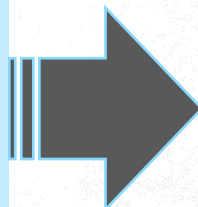
Persyaratan data dalam format IDEF rinci mencakup semua atribut dalam basis data

APLIKASI UMUM SPBE

APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE ini akan ditetapkan dalam bentuk **Peraturan Presiden**



Identifikasi Layanan Pemerintah



Dukungan Teknologi



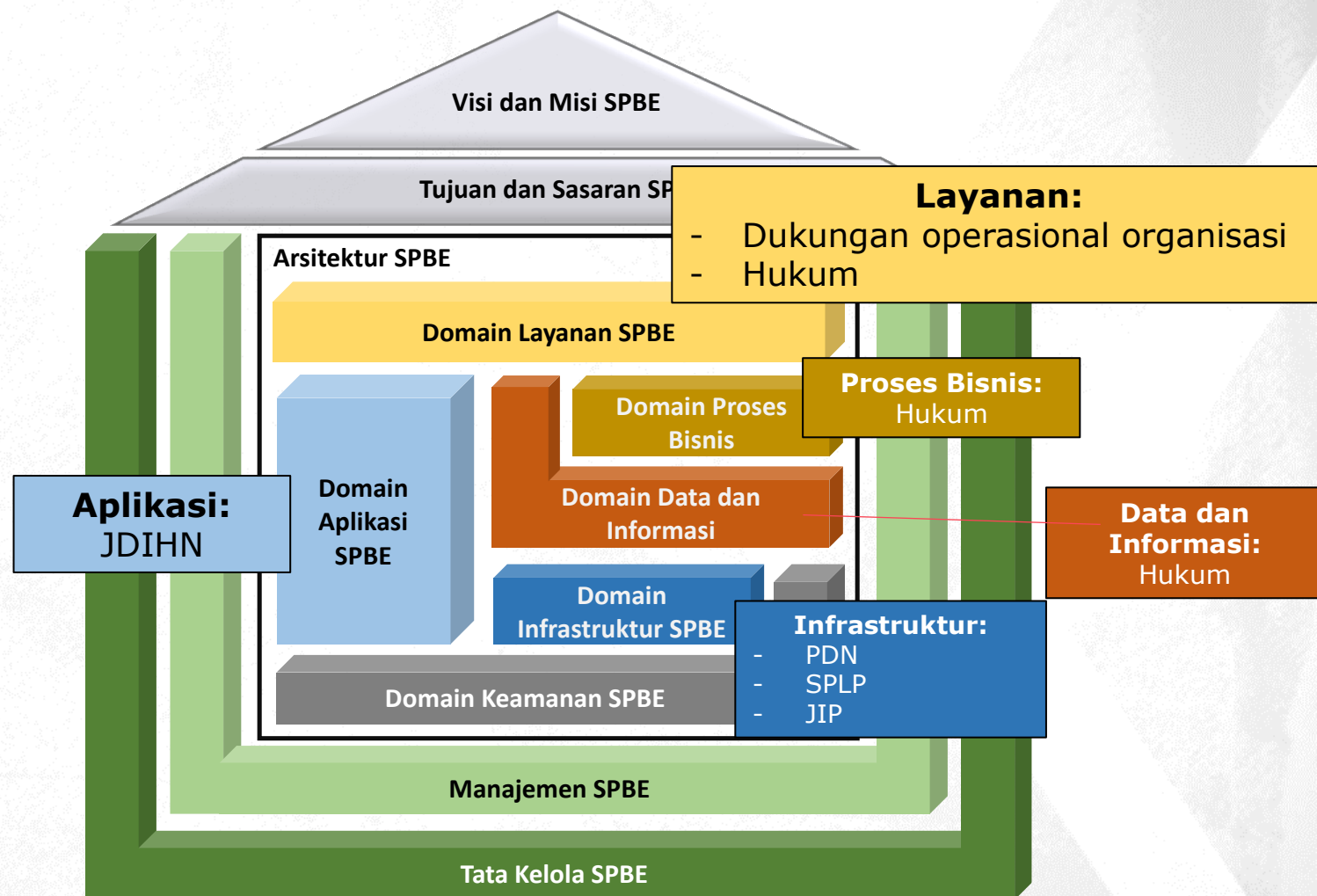
Dukungan Manajemen dan Tata Kelola



Kerangka Kerja SPBE

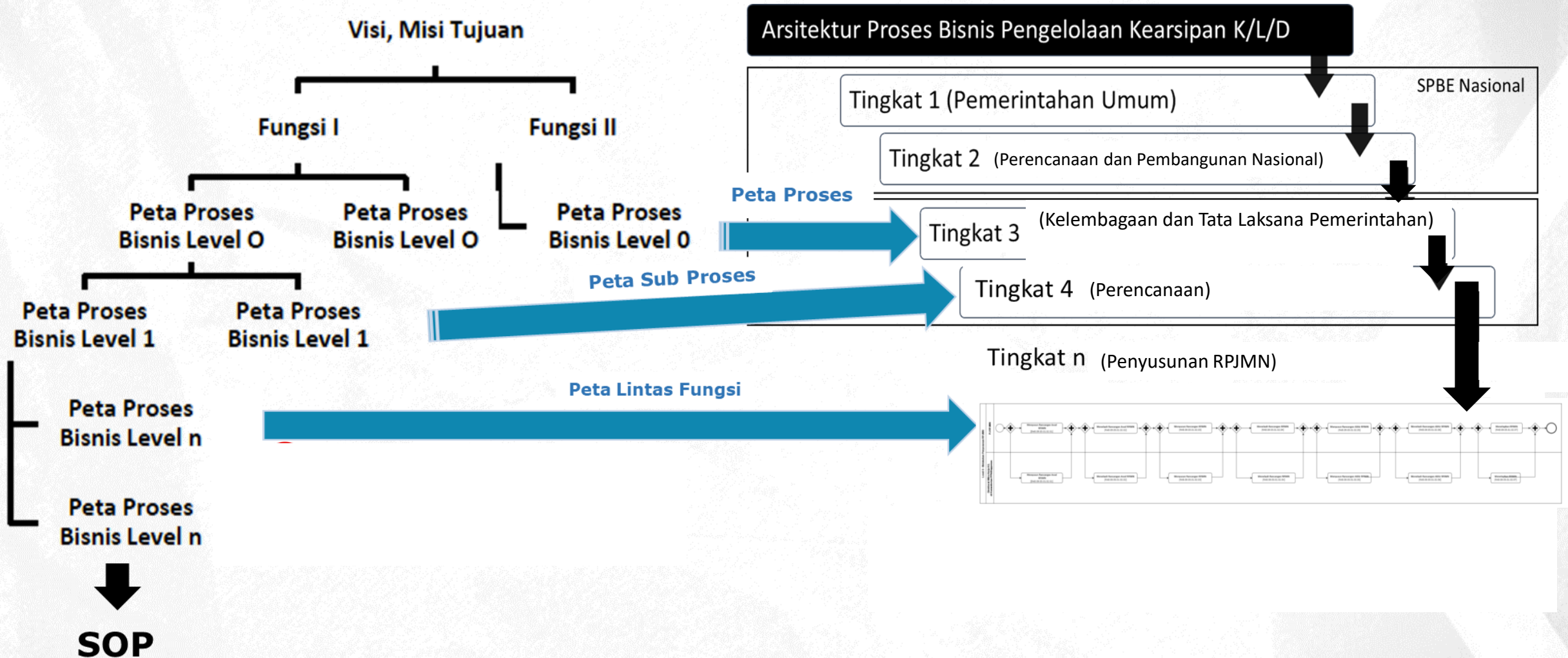


Arsitektur SPBE



APLIKASI UMUM SPBE

APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



APLIKASI UMUM SPBE

APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

Proses Bisnis:
09.05.01 Perencanaan
09.05.02 Penganggaran

Pengecekan daftar RAB
(RAB.09.05.01.01
dimana?)

No.	Kode Proses	Nama Proses
1	[RAB.09.05.01.02]	Melakukan penyusunan RPJMN
2	[RAB.09.05.01.03]	Melakukan penyusunan Renstra K/L
3	[RAB.09.05.01.04]	Melakukan penyusunan RKP
4	[RAB.09.05.01.05]	Melakukan penyusunan Renja K/L
5	[RAB.09.05.01.06]	Menyusun Perencanaan DAK Fisik
6	[RAB.09.05.01.07]	Melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah
7	[RAB.09.05.02.01]	Melakukan penyusunan Pagu K/L
8	[RAB.09.05.02.02]	Menyusun Penganggaran DAK Fisik
9	[RAB.09.05.01.02.01]	Menyusun Rancangan Awal RPJMN
10	[RAB.09.05.01.02.02]	Menelaah Rancangan Awal RPJMN
11	[RAB.09.05.01.02.03]	Menyusun Rancangan RPJMN
12	[RAB.09.05.01.02.04]	Menelaah Rancangan RPJMN
13	[RAB.09.05.01.02.05]	Menyusun Rancangan Akhir RPJMN
14	[RAB.09.05.01.02.06]	Menelaah Rancangan Akhir RPJMN

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPPENAS menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;

b. koordinasi . . .

- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;
- d. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
- h. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;

APLIKASI UMUM SPBE

APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE

Risiko Positif

Risiko	Dampak	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Penanggung Jawab
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan nilai indeks SPBE2. Kepuasan terhadap layanan Aplikasi Umum	Reputasi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penerapan SPBE meningkat	Eksplorasi risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi dan bimtek Aplikasi Umum2. Menjaga/meningkatkan kualitas layanan (SLA) pengoperasian Aplikasi Umum3. Pemanfaatan Pusat Data sementara dan pembangunan Pusat Data Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. ANRI, Kementerian PANRB (Deputi Yanlik), dan Kementerian Kominfo2. Kementerian Kominfo3. Kementerian Kominfo

- Penggunaan/berbagi pakai data JDIH oleh K/L
- Integrasi data JDIH
- Menurunkan potensi aplikasi sejenis dengan pengembangan aplikasi JDIH untuk memenuhi kebutuhan informasi dokumentasi produk hukum pemerintah

APLIKASI UMUM SPBE

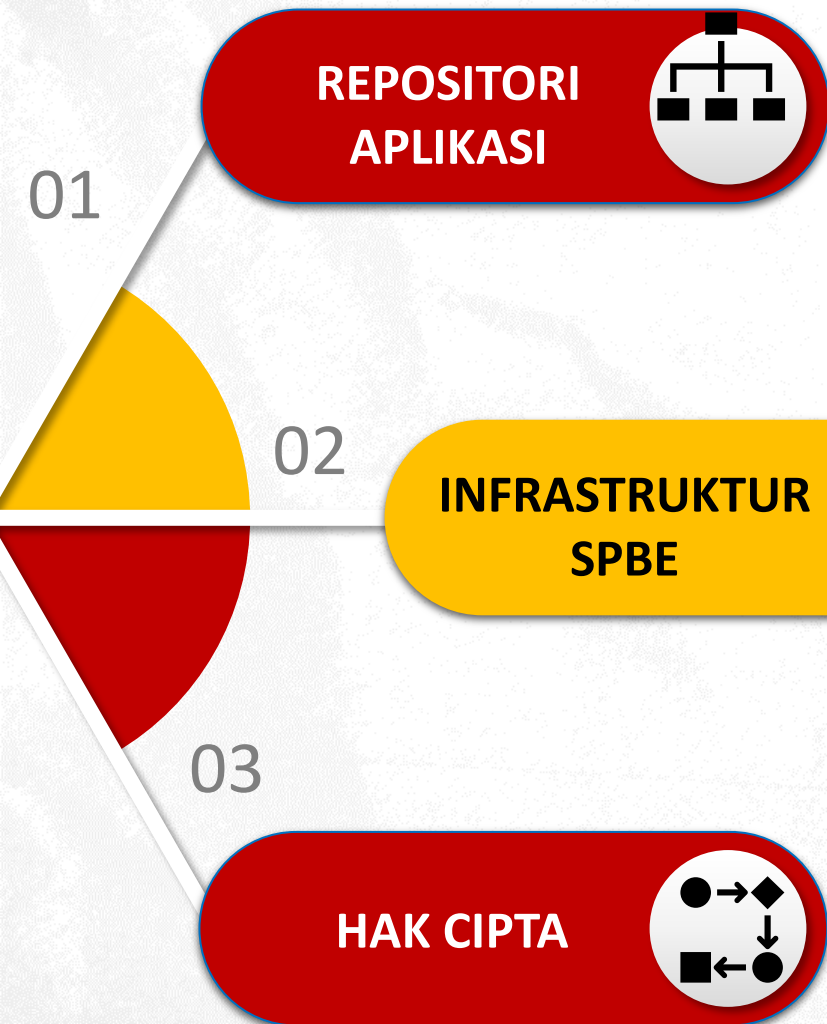
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE

Risiko Negatif

Risiko	Dampak	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Penanggung Jawab
Proses bisnis aplikasi umum berbeda dengan penerapan proses bisnis di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Integrasi aplikasi umum dan aplikasi sejenis sulit dilakukan	Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan aplikasi sejenis yang digunakan K/L/D Mendorong dan memberikan asistensi K/L/D menggunakan aplikasi umum Memberikan asistensi penyesuaian proses bisnis. 	<ol style="list-style-type: none"> ANRI dan Kementerian PANRB (Deputi Yanlik) ANRI, Kementerian PANRB (Deputi Yanlik), dan Kementerian Kominfo ANRI, Kementerian PANRB (Deputi Yanlik), dan Kementerian Kominfo
Kesulitan penggunaan Aplikasi Umum oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Penggunaan aplikasi umum menjadi tidak optimal	Mitigasi Risiko	Melakukan sosialisasi dan bimtek penggunaan aplikasi umum ke K/L/D	ANRI, Kementerian PANRB (Deputi Yanlik), dan Kementerian Kominfo
Kesulitan Integrasi data aplikasi sejenis dengan data aplikasi umum	Proses integrasi data memakan waktu lama dan sulit dilakukan	Mitigasi Risiko	Memberikan asistensi integrasi data dan aplikasi	Kementerian Kominfo
Pencurian, kehilangan, dan kerusakan data	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya kualitas data dalam hal konsistensi, akurasi, dan kemitakhiran data Hilangnya aset negara 	Penghindaran/ Pencegahan Risiko	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan back up data dan uji coba pemulihan data secara berkala Melakukan Audit TIK Melakukan monitoring terhadap serangan keamanan Melakukan bimtek kewanitaan informasi pada K/L/D 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Kominfo BPPT dan BSSN BSSN BSSN

IMPLEMENTASI APLIKASI UMUM

SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE



Penempatan Aplikasi Umum:

1. Aplikasi Umum dan kode sumbernya akan disimpan pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kominfo
2. Aplikasi Umum dan kode sumbernya akan dipindahkan ke Pusat Data Nasional setelah beroperasi

Kesiapan Infrastruktur:

1. Pemetaan kesiapan dari Infrastruktur TIK dari sisi penyedia maupun pengguna untuk menjaga kualitas dari layanan
2. Pembahasan manajemen layanan aplikasi umum yang meliputi proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE

Pendaftaran Hak Cipta:

1. Aplikasi Umum merupakan aplikasi milik negara
2. Aplikasi Umum akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Hak Cipta setelah ditetapkan (Dirjen HAKI)

IMPLEMENTASI APLIKASI UMUM

HARAPAN PENERAPAN APLIKASI UMUM JDIHN



Aplikasi Umum Bidang JDIHN menjadi pondasi penerapan produk hukum dalam bentuk digital dalam rangka mendukung terwujudnya Digitalisasi Produk Hukum Nasional



Penerapan JDIHN hendaknya mampu mewujudkan BPHN sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara khususnya dalam pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENUTUP



 ***Thank You***
TERIMA KASIH